

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah sistem yang terbentuk dari sub sistem-sub sistem berupa daerah otonom yang dipengaruhi dan mempengaruhi berjalannya sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk di dalamnya Kabupaten Sumba Barat.

Dengan kedudukan tersebut, berbagai perubahan pada aras nasional dan regional dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan negara, terus memengaruhi tatanan pemerintahan lokal, dan dalam posisi tersebut, Kabupaten Sumba Barat turut masuk dalam pusaran perubahan yang terus-menerus terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti sekarang ini.

Secara kronologis, perjalanan pemerintahan Kabupaten Sumba Barat dapat ditelaah pada masa pra kemerdekaan di mana setelah Tahun 1900, kerajaan-kerajaan yang ada telah berubah menjadi daerah-daerah swapraja yakni di Pulau Sumba sebanyak 15 swapraja yaitu : Kanatang, Lewa-Kambera, Takundung, Melolo, Rendi Mangili, Weijelu, Masukaren, Laura, Waijewa, Kodi, Lauli, Membora, Umbu Ratunggay, Anakalang, Wanokaka, Lambaja.

Pada zaman penjajahan Belanda, Pulau Sumba merupakan bagian wilayah hukum keresidenan Timor dan daerah takluknya (*Residentie Timor en Onder Hoorig Heden*). Keresidenan Timor dan daerah bagian barat (Timor Indonesia pada waktu itu, Flores, Sumba, Sumbawa serta pulau-pulau lain di sekitarnya seperti Rote, Sabu, Alor, Pantar, Lomblen, (Adonara, Solor) merupakan satu kesatuan dalam keresidenan Timor.

Keresidenan Timor dan daerah taklukannya berpusat di Kupang, yang memiliki wilayah terdiri dari tiga *afdeeling* (Timor, Flores, Sumbawa

dan Sumba), 15 *onder afdeeling* dan 48 swapraja. *Afdeeling* Timor dan pulau-pulau terdiri dari 6 *onder afdeeling* dengan ibukotanya di Kupang. *Afdeeling* Flores terdiri dari 5 *onder afdeeling* dengan ibukotanya di Ende, dan yang ketiga adalah *Afdeeling* Sumbawa dan Sumba dengan ibukota di Raba (Bima). *Afdeeling* Sumbawa dan Sumba ini terdiri dari 4 *onder afdeeling*, sedangkan *afdeeling* dipimpin oleh seorang asisten residen. Asisten residen ini membawahi kontrolir/*controleur* dan *geraghebber* sebagai pemimpin *Onder afdeeling*. Residen, asisten residen, *kontroliir* dan *gezaghebber* adalah pamong praja Kolonial Belanda. Para kepala *onder afdeeling* yakni kontrolir dibantu oleh pamong praja bumi putera berpangkat *bestuurs assistant*.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa setelah takluknya Angkatan Perang Belanda terhadap Bala Tentara Jepang pada Tanggal 8 Maret 1942, wilayah Indonesia bagian timur termasuk wilayah Nusa Tenggara Timur, berda di bawah kekuasaan angkatan laut Jepang (*Kaigun*) yang berkedudukan di Makassar. Dalam menjalankan pemerintahannya, *Kaigun* mengangkat seorang *Minseifu* yang wilayah Indonesia bagian timur berkedudukan di Makasar, sedangkan untuk pemerintahan di bawahnya diangkat seorang *Minseibu* yang untuk daerah Nusa Tenggara Timur termasuk ke dalam *Sjoo Sunda Shu* (Sunda Kecil) yang berada di bawah pimpinan *Minseifu Cokan* yang berkedudukan di Singaraja. Di samping *Minseibu Cokan*, terdapat dewan perwakilan rakyat yang disebut *Syoo Sunda Sukai Yin*, dengan berpusat di Singaraja, di mana putra asal Nusa Tenggara Timur yakni Raja Amarasi H. A. Koroh, dan I.H. Doko, pernah menjadi anggotanya.

Untuk pemerintahan daerah, perubahan terjadi pada penggunaan istilah yakni wilayah *afdeeling* dirubah menjadi Ken dan di *Nusa Tenggara Timur*, ada tiga Ken yakni Timor Ken, Flores Ken dan Sumba Ken. Ken ini masing-masing dikepalai oleh *Ken Kan Rikan*. Sedangkan tiap Ken terdiri dari beberapa Bunken (sama dengan wilayah *onder afdeeling*) yang dikepalai *Bunken Karikan*. Di bawah wilayah

Bunken adalah swapraja–swapraja yang dikepalai oleh raja–raja dan pemerintahan swapraja ke bawah sampai ke rakyat tidak mengalami perubahan.

Keadaan pemerintahan pasca kemerdekaan, dapat ditelaah melalui keluarnya Undang–Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai dasar pembentukan daerah–daerah otonom baru provinsi dan kabupaten di Indonesia. Walaupun dengan keluarnya undang–undang tersebut, Nusa Tenggara Timur yang pada saat itu merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara masih merupakan provinsi administratif.

Dengan memperhatikan aspirasi rakyat dan kemungkinan pembentukan daerah otonom baru di Indonesia, Pemerintah Pusat selanjutnya membentuk Panitia Pembangunan Daerah dengan Keputusan Presiden Nomor 202/1956 yang bertugas mengadakan penelitian tentang kemungkinan pembagian Provinsi Nusa Tenggara. Berdasarkan pertimbangan Panitia dengan memperhatikan aspirasi rakyat Nusa Tenggara Timur saat itu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21/1950 (Lembaran Negara RIS) Tahun 1950 Nomor 59 Jo. Undang–undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 dan Undang–undang Nomor 64 Tahun 1958, Provinsi Nusa Tenggara dibagi atas tiga daerah tingkat I yakni : Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, di mana Sumba Barat merupakan salah satu bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pembentukan daerah otonom baru di Indonesia, ditunjukkan melalui keluarnya Undang–undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok–pokok Pemerintahan Daerah, dan sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah mengeluarkan Undang–undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dalam undang–undang tersebut, wilayah Sumba Barat meliputi daerah–daerah swapraja : Loura, Wewewa, Kodi, Lauli, Mamboro, Umbu

Ratu Nggay, Lamboya, Anakalang, dan Wanokaka, selanjutnya dikenal dengan nama Daerah Tingkat II Sumba Barat, yang diresmikan bersama Kabupaten Sumba Timur pada Tanggal 13 Desember 1958 di Waingapu.

Pada awal pembentukannya, Kabupaten Sumba Barat terdiri atas empat kecamatan meliputi : Kecamatan MAU meliputi wilayah Mambo, Anakalang dan Umbu Ratu Nggay, Kecamatan Lalawano meliputi wilayah Lau, Lamboya dan Wanokaka, Kecamatan Wewewa meliputi Wewewa Timur dan Wewewa Barat, Kecamatan Lokotari meliputi wilayah Loura, Kodi dan Tana Righu.

Guna menunjang terselenggaranya roda pemerintahan Daerah-daerah Tingkat II, Pemerintah Pusat menunjuk para Pejabat Sementara Kepala Daerah Tingkat II, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 29 Oktober 1958 Nomor 7/14/34, tentang Pengangkatan Para Pejabat Sementara Kepala Daerah Tingkat II dalam wilayah Nusa Tenggara Timur antar lain Pejabat Sementara Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat.

Dari rangkaian perjalanan pemerintahan Kabupaten Sumba Barat hingga saat ini, terjadi suksesi kepemimpinan pemerintahan daerah yang terjadi silih berganti, dengan corak dan semangat pemerintahan yang tidak terlepas dari konstelasi pemerintahan dan politik pada aras nasional. Ada pun pejabat pemerintahan tersebut dapat disebutkan sebagai berikut :

1. L. Kalumbang (Almarhum) dari 13-12-1958 s/d 15-2-1960 sebagai Ps. Kepala Daerah.
2. C.M.K. Amalo (Almarhum) dari 15-2-1960 s/d 27-5-1960 sebagai Ps. Kepala Daerah.
3. L. Kalumbang, Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat, dari Tanggal 27 Mei 1960 sampai dengan 20 September 1962;
4. H.R. Kanadjara, Ps Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat, dari Tanggal 3 April 1961 sampai dengan 20 September 1962;

5. Umbu Remu Samapaty, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat, dari Tanggal 20 September 1962 sampai dengan 1 September 1973;
6. Drs. Umbu Tonga, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat, dari Tanggal 1 September 1973 sampai dengan 1 September 1978;
7. Letkol (U) Dominggus Pandango, SH, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat dari Tanggal 1 September 1978 sampai dengan 13 Desember 1984;
8. Drs. Umbu Djima, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat, dari Tanggal 18 April 1985 sampai dengan 18 April 1995;
9. Letkol (U) Rudolf Malo, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat, dari Tanggal 18 April 1995 sampai dengan Tanggal 1 Mei 2000;
10. Th. Langgar, SH dan Drs. Julianus Pote Leba, M.Si (Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat), dari Tanggal 1 Mei 2000 sampai dengan 1 Mei 2005;
11. Ir. Piet Djami Rebo, M.Si (Penjabat Bupati Sumba Barat), dari Tanggal 2 Mei 2005 sampai dengan 30 Agustus 2005;
12. Drs. Julianus Pote Leba, M.Si dan dr. Kornelius Kodi Mete (Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat), dari Tanggal 30 Agustus 2005 sampai Tanggal 4 Agustus 2008, di mana dr. Kornelius Kodi Mete mengundurkan diri dari jabatan Wakil Bupati untuk menjadi Calon Bupati pada Pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya;
13. Drs. Julianus Pote Leba, M.Si dan T.L. Ora, SH (Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat), dari Tanggal 3 November 2008 sampai 30 Agustus 2010;
14. Jubilate Pieter Pandango, S.Pd, M.Si, dan Reko Deta, S.IPem (Bupati Sumba Barat, dan Wakil Bupati Sumba Barat), dari Tanggal 21 September 2010 sampai 21 September 2015;
15. Drs. Paulus S.K.Limu (Penjabat Bupati Sumba Barat), dari Tanggal 21 September 2015 sampai 17 Pebruari 2016.

16. Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Marthen Ngailu Toni, SP (Bupati Sumba Barat dan Wakil Bupati Sumba Barat

Dari suksesi kepemimpinan yang digambarkan di atas, secara tidak langsung merepresentasikan dinamika pemerintahan yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat, baik berkaitan dengan kepemimpinan pemerintahan, maupun perubahan pada struktur dan fungsi pemerintahan.

Pada Tahun 1963, terjadi penambahan kecamatan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal 20 Juli 1963 Nomor Pem.66/1/32, di mana Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat mendapat tambahan 3 kecamatan baru sehingga menjadi 7 kecamatan yakni : Kecamatan Kodi, Kecamatan Laratama, Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Timur, Kecamatan Lauli, Kecamatan Walakaka, dan Kecamatan Katikutana, dengan 8 perwakilan kecamatan/kecamatan pembantu meliputi : Kecamatan Pembantu-kecamatan pembantu : Loli, Umbu Ratu Nggay, Mamboro, Wanokaka, Tana Righu, Wewewa Selatan, Palla, dan Kodi Bangedo.

Pada Tahun 1992, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1992, Perwakilan Kecamatan Loli/Kecamatan Pembantu Loli, ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan Kota Waikabubak, sehingga terjadi penambahan kecamatan di Kabupaten Sumba Barat menjadi 8 kecamatan dan 7 kecamatan pembantu, dan berlangsung sampai dengan terjadinya reformasi Tahun 1998 dan pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah khususnya di Kabupaten Sumba Barat yakni terjadi peningkatan status 7 kecamatan pembantu menjadi kecamatan definitif. Langkah ini dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mendekatkan pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan. Aspirasi

masyarakat berkembang cukup intens agar beberapa kecamatan pembantu segera dimekarkan sehingga aspirasi ini selanjutnya direspon oleh Pemerintah dan DPRD Kabupaten Sumba Barat, melalui pembahasan pada Sidang DPRD Kabupaten Sumba Barat, dan akhirnya ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sumba Barat sehingga secara keseluruhan, terdapat 15 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat.

Perubahan terus bergulir dan pada Tahun 2003, bertumbuh aspirasi masyarakat di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Katikutana dan Kecamatan Kodi untuk memekarkan kedua kecamatan ini. Aspirasi tersebut selanjutnya direspon oleh pemerintah daerah melalui kajian berdasarkan kriteria pembentukan kecamatan, dan hasil kajian menunjukkan bahwa kedua wilayah tersebut, memenuhi syarat untuk dimekarkan.

Selanjutnya Pemerintah mengajukannya untuk dibahas bersama DPRD Kabupaten Sumba Barat dan akhirnya ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat dan Kecamatan Kodi Utara di Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri E) Tanggal 2 Maret 2005.

Berbagai dinamika perubahan telah terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sumba Barat. Salah satu perubahan signifikan yang terjadi adalah Pemekaran Kabupaten Sumba Barat yang mencapai titik kulminasi pada Tanggal 22 Mei 2007 melalui peresmian Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Barat Daya oleh Menteri Dalam Negeri Ad Interim di Kupang, setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara

Timur melalui Rapat Paripurna DPR Republik Indonesia pada Tanggal 8 Desember 2006 di Jakarta.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Kabupaten Sumba Barat terdiri dari Kecamatan-kecamatan : Loli, Kota Waikabubak, Tana Righu, Lamboya dan Wanokaka.

Selanjutnya untuk merespon aspirasi masyarakat yang ingin memekarkan Kecamatan Lamboya menjadi Kecamatan Lamboya dan Kecamatan Laboya Barat, Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Sumba Barat melakukan pengakajian, pembahasan dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Laboya Barat di Kabupaten Sumba Barat. Dengan demikian Kabupaten Sumba Barat terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu : Loli, Kota Waikabubak, Tana Righu, Lamboya, Wanukaka, dan Laboya Barat.

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di bagian barat Pulau Sumba, dengan letak berada pada $9^{\circ}22'$ - $9^{\circ}47'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}7'$ - $119^{\circ}33'$ Bujur Timur, dan memiliki batas-batas administratif pemerintahan : sebelah timur dengan Kabupaten Sumba Tengah, sebelah barat dengan Kabupaten Sumba Barat Daya, sebelah utara dengan Selat Sumba, dan sebelah selatan dengan Lautan Indonesia.

Luas wilayah sebesar 737,86 Km², dengan rincian luas kecamatan : Kecamatan Loli 132,30 Km², Kecamatan Kota

Waikabubak 44,77 Km², Kecamatan Laboya Barat 161,23 Km², Kecamatan Wanukaka 134,12 Km², Kecamatan Tana Righu 139,79 Km², dan Kecamatan Lamboya 125,65 Km². Jika luas wilayah daratan di atas diakumulasikan dengan luas wilayah laut, maka total wilayah Kabupaten Sumba Barat adalah 1.178,86 Km², yakni terdiri dari wilayah daratan seluas 737,86 Km², dan wilayah laut seluas 441 Km².

Topografi Kabupaten Sumba Barat menunjukkan variasi yang cukup bermakna antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, di mana sebagian besar atau 50% wilayahnya berbukit dengan kemiringan 14°–40°. Keadaan topografi tersebut selanjutnya telah memengaruhi penggunaan lahan oleh masyarakat, serta berimplikasi pula terhadap pola perkebunan dan pola peternakan. Data menunjukkan bahwa penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah seluas 5.675 Ha dan luas lahan kering 68.111 Ha yang telah dimanfaatkan untuk perumahan, tegalan/ladang, perkebunan, hutan, padang penggembalaan, dan lain-lain, sedangkan jika dilihat dari ketinggian wilayah, khususnya pasca pemekaran, Kecamatan Loli dan Kecamatan Kota Waikabubak berada pada ketinggian 200–600 m *dpl*, Kecamatan Wanukaka berada pada ketinggian 0–450 m *dpl*, Kecamatan Lamboya dan Kecamatan Laboya Barat berada pada ketinggian 0–700 m *dpl*, dan Kecamatan Tana Righu berada pada ketinggian 0–550 m *dpl*.

Dari aspek klimatologi menunjukkan bahwa Kabupaten Sumba Barat dipengaruhi oleh iklim muson dengan rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 128 hari, dengan rata-rata curah hujan sebanyak 2.797 milimeter, dengan curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Tana Righu (3.875 milimeter), sedangkan wilayah dengan curah hujan terendah adalah Kecamatan Wanukaka dengan curah hujan 1.841 milimeter.

Dengan rata-rata curah hujan seperti ditunjukkan, telah memengaruhi kondisi hidrologi di Kabupaten Sumba Barat. Data

menunjukkan bahwa secara hidrologi, Sumba Barat didominasi oleh air bawah tanah, air permukaan dan sungai dengan berbagai variasi yang selanjutnya memengaruhi persediaan air di Kabupaten Sumba Barat, termasuk kondisi curah hujan tersebut akan memengaruhi pola pertanian di suatu wilayah, dan akan memengaruhi hasil produksi pertanian sebagaimana dihadapi oleh Kabupaten Sumba Barat selama lima tahun terakhir.

Kondisi menunjukkan bahwa dengan hidrologi wilayah yang terjadi, terdapat sungai tanpa air atau dengan debit air yang terbatas untuk didayagunakan bagi kebutuhan masyarakat. Terdapat beberapa sungai besar yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain : Sungai Kadengara dengan panjang 6 Km, Sungai Tabaka Dana dengan panjang 2,5 Km, Sungai Loku Bakul dengan panjang 11 Km, dan Sungai Loko Kalada dengan panjang 15 Km.

Selain kondisi yang dipaparkan di atas, jika dilihat dari kawasan hutan, terdapat penurunan kawasan hutan yang cukup signifikan jika dibandingkan keadaan sebelum pemekaran. Saat ini kawasan hutan di Kabupaten Sumba Barat seluas 13.174,34 Ha atau sebesar 0,18% dari total luas wilayah daratan sebesar 7.378.600 Ha, sehingga telah menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus mengupayakan rehabilitasi, konservasi, pengembangan hutan produksi secara berkelanjutan, yang diharapkan dapat mengembalikan fungsi hutan untuk menjaga keseimbangan ekologi di daerah ini.

Beberapa gambaran kondisi geografis yang dipaparkan di atas, secara langsung telah memengaruhi berbagai tatanan kehidupan masyarakat dan memengaruhi pula guliran kebijakan pemerintah daerah dalam menangani berbagai permasalahan pembangunan yang terjadi di daerah ini dalam Tahun 2010–2015, seperti telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2015 yang menjadi acuan implementasi program/kegiatan Tahun 2015.

2. Gambaran Umum Demografis

Penduduk Kabupaten Sumba Barat pada Tahun 2015 berjumlah 143.489 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 32.249. Jumlah penduduk tersebut jika diklasifikasikan menurut jenis kelamin : laki-laki sebanyak 77.371 jiwa dan perempuan sebanyak 73.231 jiwa, dengan tingkat kepadatan sebesar 204 jiwa/Km².

Tingkat kepadatan penduduk per kilometer persegi sangat bervariasi, yakni Kecamatan : Kota Waikabubak 875 jiwa/Km², Loli 297 jiwa/Km², Kecamatan Lamboya 138 jiwa/Km², Kecamatan Wanukaka 141 jiwa/Km², Kecamatan Tana Righu 163 jiwa/Km² dan Kecamatan Laboya Barat 73 jiwa/Km².

Gambaran tentang penduduk Kabupaten Sumba Barat menurut kecamatan, dapat disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 1
Jumlah Penduduk Kabupaten Sumba Barat
Tahun 2015 Menurut Kecamatan

| No. | Kecamatan | Jumlah Penduduk | | Jumlah | Kepadatan Jw/Km |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | | |
| 1. | Loli | 20.321 | 18.846 | 39.167 | 297 |
| 2. | Kota Waikabubak | 19.690 | 18.805 | 38.805 | 875 |
| 3. | Lamboya | 11.376 | 10.791 | 22.167 | 138 |
| 4. | Wanokaka | 9.684 | 9.227 | 18.911 | 141 |
| 5. | Tana Righu | 11.570 | 11.100 | 22.670 | 163 |
| 6. | Laboya Barat | 4.730 | 4.462 | 9.192 | 73 |
| Jumlah | | 77.371 | 73.231 | 150.602 | 204 |

Sumber: Dispeduk & Cipil 2015

Tabel. 2
Jumlah penduduk dan Kepala Keluarga Kabupaten Sumba Barat
menurut Kecamatan Tahun 2015

| No. | Kecamatan | Jumlah penduduk | | | Jumlah |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Kepala Keluarga | Laki-laki | Perempuan | |
| 1. | Loli | 8.257 | 20.321 | 18.846 | 39.167 |
| 2. | Kota Waikabubak | 8.484 | 19.690 | 18.805 | 38.495 |
| 3. | Lamboya | 4.714 | 11.376 | 10.791 | 22.167 |
| 4. | Wanokaka | 4.137 | 9.684 | 9.227 | 18.911 |
| 5. | Tana Righu | 4.521 | 11.570 | 11.100 | 22.670 |
| 6. | Laboya Barat | 2.136 | 4.730 | 4.462 | 9192 |
| Total | | 32.249 | 77.371 | 73.231 | 150.602 |

Sumber: Dispeduk & Cipil 2015

Tabel.3
Jumlah dan Persentase Penduduk Sumba Barat
menurut Kelompok Umur

| No | Kelompok Umur (Tahun) | 2015 | |
|---------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | Jumlah | Persentase (%) |
| 1 | 0 - 4 | 21.965 | 15 |
| 2 | 5 - 9 | 19.790 | 13 |
| 3 | 10 - 14 | 19.125 | 13 |
| 4 | 15 - 49 | 71.419 | 47 |
| 5 | 50 - 64 | 12.502 | 8 |
| 6 | 65+ | 5.797 | 4 |
| Jumlah | | 150.602 | 100 |

Sumber: Dispeduk & Cipil 2015

Dari tabel jumlah dan persentase penduduk sumba Barat menurut kelompok umur pada Tahun 2015 diatas terlihat bahwa persentase penduduk tertinggi berada dalam kelompok umur 15 -49 tahun yaitu sebesar 47%, berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk dalam usia produktif masih mendominasi penduduk Sumba Barat, dimana keadaan ini tidak mengalami perubahan struktur dari tahun –tahun sebelumnya.

Kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 masih relatif rendah sehingga hal ini memengaruhi implementasi program dan kegiatan pembangunan di daerah ini, dan juga memengaruhi pengetahuan dan ketrampilan masyarakat untuk berinisiatif dan berprakarsa dalam mengelola kehidupannya.

Pelaksanaan 4 Pilar Utama/Catur Bhakti khususnya dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, bertolak dari berbagai permasalahan pendidikan yang dihadapi Kabupaten Sumba Barat, baik menyangkut prasarana dan sarana pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat, kualitas dan kuantitas tenaga pengajar dan peserta belajar yang berada pada setiap jenjang pendidikan yang ada di Kabupaten Sumba Barat.

Selain paparan di atas, progresivitas pembangunan Kabupaten Sumba Barat selama lima tahun terakhir dapat ditelaah dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumba Barat, antara lain dapat dianalisis dari capaian kemampuan baca tulis penduduk (*literate rate*), dan rata-rata lama sekolah. Walaupun peningkatan yang terjadi belum secara signifikan menunjukkan progresivitas pendidikan rakyat Sumba Barat, namun momentum pertumbuhan ini dapat mengindikasikan adanya efektivitas penyelenggaraan pendidikan di daerah ini.

Data menunjukkan bahwa pada Tahun 2012, angka IPM Kabupaten Sumba Barat sebesar 64,88, dan pada tahun 2013

sebesar 65,49 dengan komponen angka melek huruf mengalami peningkatan pula. Data menunjukkan bahwa pada Tahun 2011, mencapai 80,42, Tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 80,44, tahun, 2013 menjadi 86.02 % dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 86,66 %.

Selain komponen di atas, efektivitas penyelenggaraan pendidikan di daerah ini sangat mempengaruhi capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik perjenjang pendidikan yang ada, sekaligus menjadi salah satu parameter dalam mengukur capaian peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendidikan, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik, penataan kurikulum, dan lain sebagainya. Untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk Sumba Barat yang bersekolah Tahun 2012, penduduk usia 7–12 tahun (SD), sebesar 106% , tahun 2013 sebesar 115%, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 108,45 % , untuk penduduk usia 13–15 tahun (SMP) sebesar 82,36% pada Tahun 2012 , Tahun 2013 yaitu sebesar 85% dan pada tahun 2015 menjadi 86,45%, sedangkan untuk penduduk usia 16–18 tahun (SMA/SMK), sebesar 101% pada tahun 2012, mengalami penurunan pada Tahun 2013 yaitu sebesar 87%, dan pada tahun 2015 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 59,32 %.

Sedangkan untuk Angka Partisipasi Murni (APM) pada Tahun 2013, untuk penduduk usia 7–12 tahun (SD), sebesar 74.51%, dan pada Tahun 2015, mengalami peningkatan yaitu sebesar 96,63%, untuk penduduk usia 13–15 tahun (SMP), pada Tahun 2013 sebesar 85,16%, mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu 77,21% sedangkan untuk penduduk usia 16–18 tahun (SMA/SMK), pada Tahun 2013 sebesar 100%, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu 51,22%.

Deskripsi tentang capaian APK dan APM dari Tahun 2011 sampai dengan 2013, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4
Data Angka Partisipasi Kasar & Angka Partisipasi Murni Tahun 2012–2015

| No. | Jenjang Pendidikan | Tahun | | |
|------------|--------------------------------|-------|-------|--------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| I. | Angka Partisipasi Kasar | | | |
| 1. | SD | 106 | 115 | 108,45 |
| 2. | SMP | 82,36 | 85 | 86,45 |
| 3. | SMA/SMK | 101 | 87 | 71,28 |
| II. | Angka Partisipasi Murni | | | |
| 1. | SD | 93,59 | 74,51 | 96,63 |
| 2. | SMP | 53,46 | 85,16 | 77,21 |
| 3. | SMA/SMK | 80,76 | 100 | 51,12 |

Sumber: Hasil olahan data

Data menunjukkan bahwa APM sebagai parameter untuk mengukur banyaknya penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu dalam satu jenjang pendidikan dari setiap 100 penduduk usia sekolah, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu walaupun masih terjadi fluktuasi akibat pemekaran daerah otonom baru, baik pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Disamping itu adanya upaya dari pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menyebabkan banyak anak yang masuk sekolah sebelum usia sekolah disemua jenjang pendidikan.

Salah satu progresivitas penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk usia 10 tahun ke atas, yang menunjukkan kecenderungan semakin meningkat tingkat pendidikan dasar khususnya pada sekolah dasar.

Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas penduduk karena kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk berumur 10 tahun ke atas. Selanjutnya jika dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk 10 tahun ke atas, secara persentase dapat disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel. 5
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Berdasarkan
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

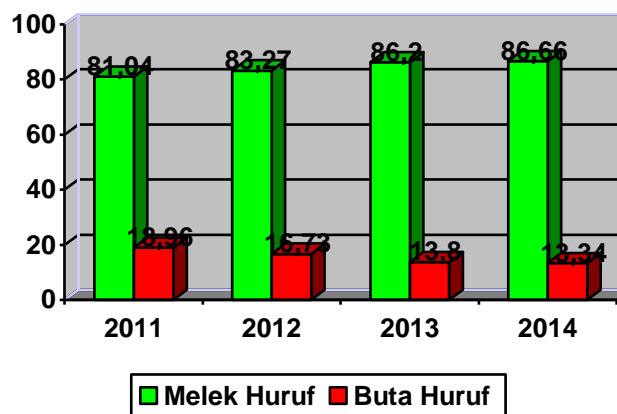
| No. | Ijazah yang Dimiliki | Tahun | |
|-----|----------------------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 |
| 1. | Tidak punya ijazah | 48,54 | 47,89 |
| 2. | SD/MI | 21,19 | 24,51 |
| 3. | SMP/MTs | 11,66 | 12,92 |
| 4. | SMA/SMK/MA | 13,24 | 12,06 |
| 5. | D1/D2 | 0,44 | 0,18 |
| 6. | D3/Sarjana Muda | 1,15 | 0,23 |
| 7. | D4/S1/S2/S3 | 3,79 | 2,19 |

Sumber : Sumba Barat dalam Angka Tahun 2015

Selanjutnya untuk angka melek huruf , pada Tahun 2011 dari penduduk usia 10 tahun ke atas, sebesar 81,04%, dan meningkat menjadi 83,27 % pada tahun 2012, tahun 2013 menjadi 86.02 %, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 86,66%. Gambaran penduduk usia 10 tahun ke atas yang melek huruf dan buta huruf, sebagaimana disajikan dalam grafik di bawah ini :

Grafik 1

Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas
yang Melek Huruf dan Buta Huruf



Data menunjukkan bahwa dari berbagai intervensi pendidikan yang dilaksanakan, baik dalam pengadaan guru/guru bantu/guru

kontrak, pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah, pengadaan meubelair, dan kegiatan lainnya, masih terdapat kekurangan tenaga yang akan menjadi perhatian pemerintah kedepan, antara lain rasio murid-guru, dan rasio guru-sekolah, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel. 6
Rasio Murid-Guru dan Guru-Sekolah
Keadaan Tahun 2012-2013

| No. | Jenjang Pendidikan | Rasio Murid-Guru | | Rasio Guru-Sekolah | |
|-----|--------------------|------------------|------|--------------------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1. | SD | 21 | 60 | 12 | 5 |
| 2. | SMP | 10 | 24 | 19 | 9 |
| 3. | SMA/SMK | 14 | 24 | 28 | 16 |

Sumber : Sumba Barat dalam Angka Tahun 2015

Data dalam tabel di atas menunjukkan perkembangan fasilitas pendidikan, dengan rasio murid-guru dan rasio guru-sekolah mengalami perubahan, di mana jenjang SD rasio murid guru sebesar 60, yang artinya ada sebanyak 60 murid yang diawasi oleh setiap guru, begitu pun pada jenjang SMP dan SMA/SMK. Keadaan ini memberikan gambaran jumlah guru di Kabupaten Sumba Barat masih belum proporsional dengan jumlah murid.

3. Kondisi Perekonomian

Jumlah penduduk di atas apabila diklasifikasikan menurut struktur usia, terdapat rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) yang pada dasarnya merupakan rasio dari jumlah penduduk usia non produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) terhadap penduduk usia produktif (usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun), masih cukup besar. Data menunjukkan bahwa penduduk usia produktif sebanyak 55,91%, sedangkan penduduk

usia non produktif sebanyak 44,19%, dengan rasio beban tanggungan sebesar 100, yakni setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 100 orang penduduk usia non produktif.

Selain itu penduduk usia produktif yakni penduduk yang berusia di atas 15 tahun hingga 64 tahun yang bukan angkatan kerja, masih relatif besar dengan persentase 44,19% terutama segmen penduduk yang masih bersekolah, ibu rumah tangga, pensiunan, mengidap penyakit, dan lainnya. Dengan persentase ketergantungan sebagaimana dimaksud, beban angkatan kerja untuk menghidupi penduduk bukan angkatan kerja akan memengaruhi distribusi kesejahteraan, penumpukan kapital, dan aspek lainnya.

Selanjutnya jumlah penduduk Kabupaten Sumba Barat menurut jenis kegiatan dapat ditelaah dari penduduk usia 15 tahun keatas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dalam hal ini didefinisikan sebagai penduduk usia 15 tahun atau lebih yang kegiatan utamanya bekerja atau mencari pekerjaan. Dengan kata lain, angkatan kerja merupakan kelompok penduduk usia kerja (usia 15 tahun keatas) yang sedang atau siap melakukan kegiatan ekonomi. Sedangkan penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun kebawah yang kegiatan utamanya bukan bekerja atau mencari pekerjaan.

Dari jumlah penduduk usia produktif Tahun 2015 yang merupakan angkatan kerja atau yang bekerja dengan bidang usaha utama yang digeluti adalah pertanian, jasa dan diikuti bidang usaha utama lainnya seperti perdagangan, industri dan lain sebagainya.

Bidang usaha utama masyarakat akan sangat memengaruhi kontribusi sektor-sektor terhadap pendapatan regional yang merupakan salah satu indikator ekonomi yang penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah.

Melalui pendapatan regional dapat di analisis beberapa karakteristik perekonomian seperti produk domestik regional bruto, struktur perekonomian, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan tingkat inflasi.

Perekonomian Sumba Barat pada dasarnya merupakan perekonomian agraris yang dicirikan dengan besarnya peranan sektor pertanian dan sektor jasa –jasa.

Tabel. 7

**Kontribusi Sektor Perekonomian terhadap PDRB
Kabupaten Sumba Barat Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha 2011 - 2013**

| No. | Lapangan Usaha | Tahun | | |
|-----|--|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Pertanian | 35,83 | 34,67 | 33,43 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 0,73 | 0,71 | 0,70 |
| 3. | Industri Pengolahan | 1,58 | 1,54 | 1,50 |
| 4. | Listrik, Gas, dan Air Minum | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 5. | Bangunan/Konstruksi | 4,25 | 4,22 | 4,19 |
| 6. | Perdagangan, Restoran, Hotel | 20,03 | 20,91 | 21,77 |
| 7. | Pengangkutan dan Komunikasi | 2,08 | 1,99 | 1,91 |
| 8. | Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan | 4,27 | 4,32 | 4,39 |
| 9. | Jasa-jasa | 30,98 | 31,39 | 31,86 |

Sumber : Indikator Ekonomi Sumba Barat 2015

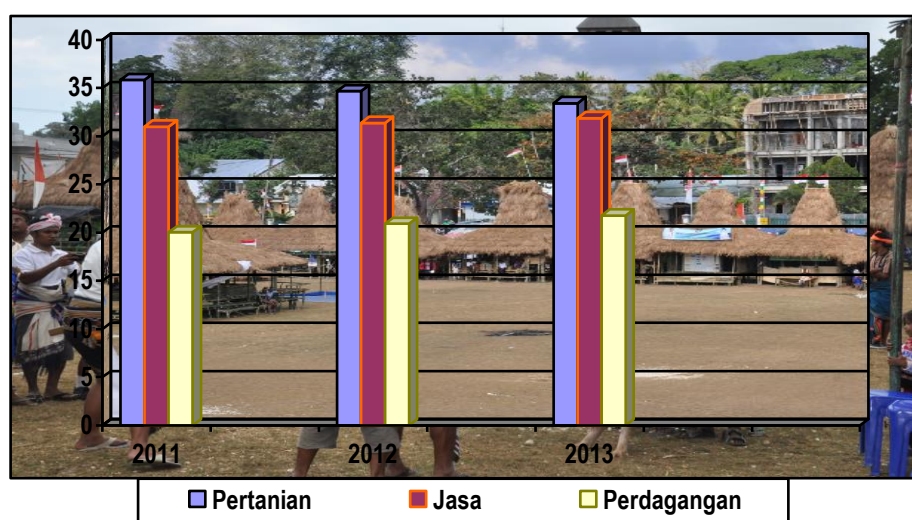
Data dalam tabel di atas dapat menjadi acuan untuk melihat struktur perekonomian Kabupaten Sumba Barat dari tahun ke tahun cenderung mengalami perubahan yang ditandai dengan semakin mengecilnya peranan sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar harga berlaku, sehingga jika dibarengi bertumbuhnya sektor sekunder dan tersier, pada jangka panjang akan meningkatkan daya saing perekonomian daerah.

Berdasarkan tabel di atas dalam kurung waktu beberapa tahun terakhir belum terjadi pergeseran stuktur ekonomi yang cukup signifikan di Sumba Barat. Sektor primer (pertanian) masih

mendominasi perekonomian Sumba Barat, sedangkan sektor tersier (jasa-jasa dan perdagangan) memberi kontribusi yang setiap tahunnya semakin meningkat terhadap PDRB Kabupaten Sumba Barat. Sektor sekunder (Industri pengolahan) kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Sumba Barat terus menurun, sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini :

Grafik 2

Persentase Tiga Bidang Usaha Utama Pemberi Kontribusi Terbesar Terhadap PDRB Kabupaten Sumba Barat



Angka PDRB ini menunjukkan besaran ekonomi secara keseluruhan untuk suatu wilayah dan tidak mencerminkan tingkat perekonomian penduduknya, dimana suatu daerah dengan tingkat PDRB yang rendah kemungkinan rata-rata pendapatan perkapitanya tinggi begitupun sebaliknya hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar.

Seperti diketahui angka perkapita menunjukkan rata-rata PDRB untuk setiap penduduk suatu daerah. PDRB perkapita yang tinggi menunjukkan semakin baiknya perekonomian rata-rata penduduk daerah tersebut, demikian pula sebaliknya. Gambaran rata-rata PDRB perkapita dan pendapatan perkapita penduduk

Sumba Barat atas dasar harga berlaku , disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 8
Rata-rata PDRB per Kapita dan Pendapatan Perkapita
Penduduk Sumba Barat Atas Dasar Harga Berlaku
(Dalam Ribuan Rupiah)

| No. | Tahun | PDRB Perkapita (juta Rupiah) | Pendapatan Perkapita (Juta Rupiah) |
|-----|-------|---------------------------------|--|
| 1. | 2011 | 7.179,06 | 6.714,14 |
| 2. | 2012 | 8,022,21 | 7.532,86 |
| 3. | 2013 | 8.945,17 | 8,399,51 |

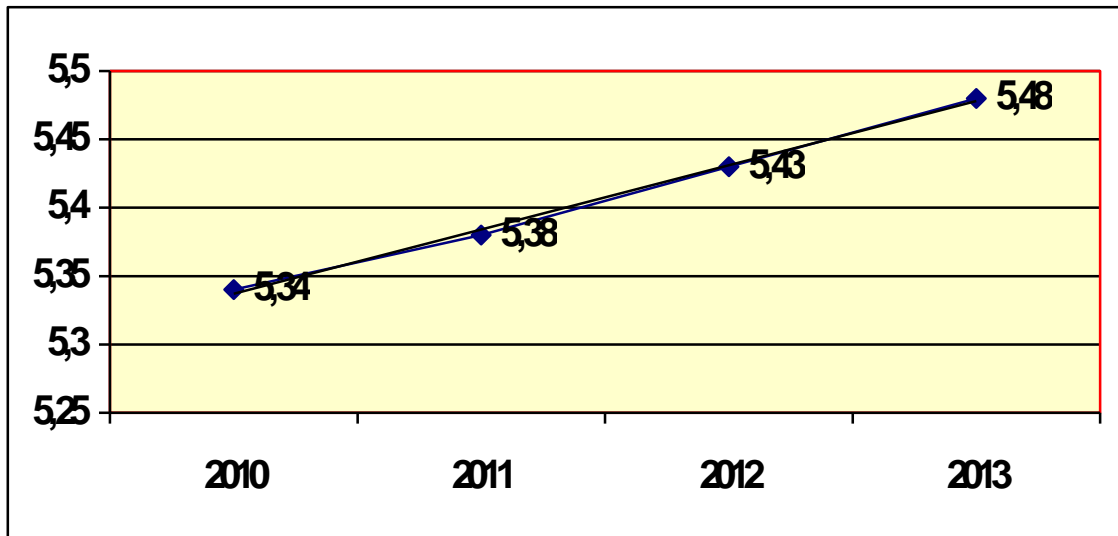
Sumber : Sumba Barat dalam Angka Tahun 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat PDRB perkapita Sumba Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sementara pendapatan perkapita juga mengalami peningkatan .

Pertumbuhan ekonomi Sumba Barat yang ditunjukkan oleh angka pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000, pada Tahun 2013 mencapai 5,48%, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,43%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kecuali sektor pertanian, hampir semua sektor lapangan usaha mengalami peningkatan pertumbuhan.

Pertumbuhan riil sektor ekonomi Sumba Barat dapat dilihat dari grafik di bawah ini :

Grafik 3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumba Barat
Tahun 2010–2013



Sumber : Indikator Ekonomi Kabupaten Sumba Barat 2015

Pertumbuhan perekonomian tersebut dipengaruhi oleh peningkatan sumbangan sektor-sektor ekonomi terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan terdapat pula penurunan pada beberapa sektor penyumbang dengan gradasi penurunan yang belum signifikan. Walaupun demikian, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB di atas, belum merepresentasikan distribusi kesejahteraan yang merata di dalam masyarakat.

Sebagai daerah yang bersifat agraris, Kabupaten Sumba Barat didominasi oleh sektor pertanian sekaligus sebagai potensi unggulan daerah Kabupaten Sumba Barat, sedangkan potensi unggulan berupa sumber daya alam/minyak dan mineral, hingga saat ini belum dikelola walaupun secara nyata, Sumba Barat juga memiliki beberapa kandungan mineral yang memiliki prospek ke depan. Selanjutnya sektor unggulan lainnya yang telah dan akan menjadi sektor primadona yaitu sektor perkebunan, sektor kelautan dan perikanan serta sektor peternakan, dan pariwisata.

Salah satu kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sumba Barat adalah sektor pertanian khususnya pertanian bahan makanan, dengan perbandingan produksi pada Tahun 2013 dan 2015 adalah : untuk padi sebanyak 34.094 ton, meningkat menjadi 41.395 ton, jagung dengan produksi sebanyak 13.825 ton menjadi 18.547 ton, ubi- ubian sebanyak 15.365 ton, menurun menjadi 13.677 ton, kacang-kacangan dengan produksi 323 ton meningkat menjadi 1.741 ton.

Tabel.9

Perkembangan Produksi (Ton) Komoditi Bahan Makanan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012 -2015

| No | Jenis Tanaman | Jumlah Produksi (Ton)/ Tahun | | |
|----|------------------|------------------------------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2015 |
| 1 | Padi | 20.660 | 34.094 | 41.395 |
| 2 | Jagung | 10.018 | 13.825 | 18.547 |
| 3 | Ubi - ubian | 18.372 | 15.365 | 13.677 |
| 4 | Kacang -kacangan | 134 | 323 | 1.741 |

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan

Peternakan merupakan salah satu potensi unggulan daerah yang telah dimanfaatkan dalam meningkatkan pendapatan daerah, terutama menjadi bidang usaha peningkatan ekonomi rakyat. Data menunjukkan bahwa pada Tahun 2012, populasi sapi di Kabupaten Sumba Barat sebanyak 1.522 ekor, menurun pada tahun 2013 menjadi 1.100 ekor, dan pada tahun 2015 menjadi 1.129 ekor. Untuk ternak kerbau, pada Tahun 2012 terdapat populasi sebanyak 9.945 ekor, meningkat pada tahun 2013 menjadi 10.679 ekor, dan pada tahun 2015 menjadi 10.832 ekor dan untuk ternak kuda, pada Tahun 2012 terdapat populasi sebanyak 4.082 ekor, meningkat pada tahun 2013 menjadi 4.234 ekor, dan pada tahun 2015 menurun menjadi 4.114 ekor . Selain potensi unggulan berupa ternak besar, terdapat potensi ternak sedang dan kecil berupa : kambing sebanyak 2.276 ekor, babi

sebanyak 46782 ekor, ayam sebanyak 231.729 ekor, dan itik sebanyak 3.223 ekor.

Gambaran tentang potensi peternakan Kabupaten Sumba Barat dapat disajikan dalam tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel. 10

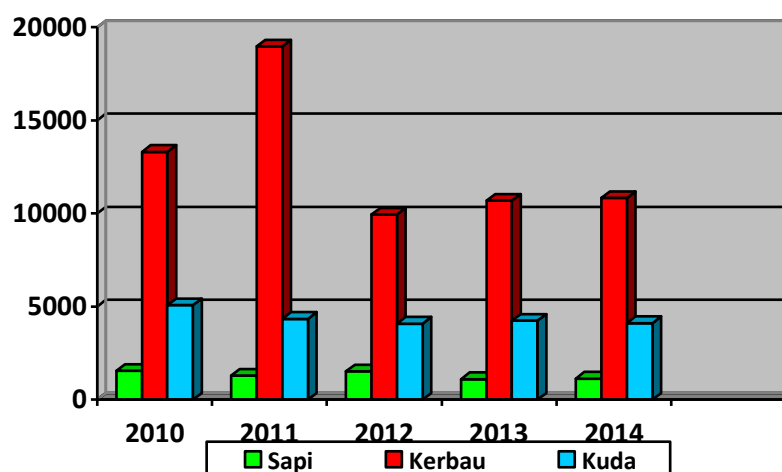
Perkembangan Populasi Ternak Besar di Kabupaten Sumba Barat

| No. | Tahun | Ternak (Ekor) | | |
|-----|-------|---------------|--------|-------|
| | | Sapi | Kerbau | Kuda |
| 1.. | 2010 | 2.585 | 16.611 | 5.526 |
| 2. | 2011 | 1.926 | 17.161 | 5.699 |
| 3. | 2012 | 1.522 | 9.945 | 4.082 |
| 4. | 2013 | 1.100 | 10.679 | 4.234 |
| 5. | 2015 | 1.129 | 10.832 | 4.114 |

Sumber : Sumba Barat dalam Angka Tahun 2009–2013

Grafik 4

Perkembangan Populasi Ternak Besar di Kabupaten Sumba Barat



Jika memperhatikan pertumbuhan potensi ternak besar sebagaimana tersaji dalam tabel dan grafik di atas, dapat

dikemukakan bahwa terdapat fluktuasi perkembangan ternak besar dari tahun ke tahun, dengan potensi terbesar pada ternak kerbau, termasuk pertumbuhan potensi ternak sedang/kecil khususnya babi, kambing dan domba, mengalami penurunan, sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 11

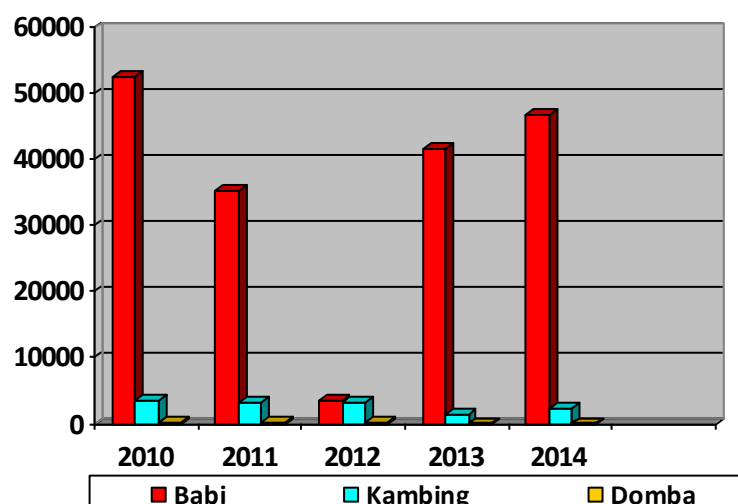
Perkembangan Populasi Ternak Sedang di Kabupaten Sumba Barat

| No. | Tahun | Ternak (Ekor) | | |
|-----|-------|---------------|---------|-------|
| | | Babi | Kambing | Domba |
| 1. | 2010 | 52.480 | 3.392 | 48 |
| 2. | 2011 | 35.406 | 3.134 | 12 |
| 3. | 2012 | 35.376 | 3.137 | 13 |
| 4. | 2013 | 41.548 | 1.370 | 3 |
| 5. | 2015 | 46.782 | 2.278 | 8 |

Sumber : Dinas Peternakan

Grafik 5

Perkembangan Populasi Ternak Sedang di Kabupaten Sumba Barat



Dari data dalam tabel dan grafik di atas, menunjukkan pertumbuhan ternak sedang mengalami fluktuasi, hal mana

dipengaruhi oleh jumlah pemotongan yang tinggi, penyakit yang menyerang ternak babi, serta secara tidak langsung dipengaruhi oleh pertumbuhan permintaan daging kambing dan domba yang relatif kecil.

Salah satu potensi unggulan daerah yang belum dioptimalkan secara baik adalah kelautan dan perikanan. Terdapat potensi kelautan dan perikanan yang sesungguhnya prospektif untuk dikembangkan. Dengan wilayah laut seluas 441 kilometer, tersedia potensi sumber daya kelautan yang dapat dioptimalkan untuk tujuan pembangunan. Data menunjukkan bahwa untuk Tahun 2015, dengan jumlah rumah tangga usaha perikanan laut sebanyak 1.295 rumah tangga, terdapat 3.877 unit armada penangkapan, berbagai jenis, dengan produksi sebanyak 2.413,13 ton, Untuk produksi perikanan laut didominasi oleh beberapa jenis ikan seperti ikan paperek, ikan merah, kerapu, ekor kuning, kakap, cucut, tongkol, cakalang/tuna, julung-julung, tenggiri dan hasil laut lainnya berupa udang, cumi-cumi, teripang dan rumput laut.

Dari berbagai upaya peningkatan dan pengembangan usaha perikanan tangkap dan budidaya, secara kualitatif mulai bertumbuh kesadaran masyarakat untuk melakukan penangkapan, meningkatnya permintaan karena terjadi perubahan pola konsumsi protein, serta adopsi teknologi dan informasi yang memengaruhi peningkatan produksi perikanan khususnya perikanan tangkap. Potensi sumber daya kelautan Sumba Barat perlu dioptimalkan dan hal ini telah menjadi perhatian pemerintah daerah melalui penelitian dan pengembangan serta pengadaan armada dan alat tangkap, pembinaan/magang dan pelatihan nelayan.

Bidang kehutanan merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup menjanjikan, di samping fungsinya menjaga keseimbangan ekologi dengan memperhatikan degradasi yang terjadi sampai dengan Tahun 2015. Terdapat luas areal kawasan hutan sebanyak 13.174,34 Ha, yang meliputi 12 kawasan hutan,

yakni : Poranumbu Rabawawi, Pogobina, Ombakaporota, Kanungga Rara, Lamboya, Kalada Wogho, Kabota, Gollu Kare, Matikatilu, Rangga Dongu, Pola Pare Cako dan Waipada di samping usaha kehutanan rakyat yang telah memberikan kontribusi dalam berbagai aspek pembangunan di daerah ini.

Selanjutnya salah satu sektor unggulan daerah yang belum dioptimalkan adalah pariwisata. Sumba Barat adalah salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengandalkan pariwisata budaya, pariwisata bahari, dan pariwisata alam, dengan *major event* Pasola Wanukaka, Pasola Lamboya dan Pasola Gaura. Sebagai daerah tujuan wisata, prasarana dan sarana penunjang telah disediakan antara lain berupa 11 hotel/penginapan/losmen, 188 kamar tidur dan 391 tempat tidur berbagai kelas.

Dengan sarana hotel yang tersedia telah menunjang kegiatan pariwisata di Kabupaten Sumba Barat selama Tahun 2010-2015, dan untuk melihat progresivitas pengembangan pariwisata di daerah ini dapat dilihat dari kontribusi bidang usaha utama perdagangan, hotel, dan restoran yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Selain capaian di atas, arus kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik, dapat menjadi salah satu alat untuk memverifikasi bertumbuhnya usaha pariwisata

4. Kondisi Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu faktor determinan dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang. Atas dasar itu, identifikasi secara menyeluruh terhadap potensi anggaran daerah telah dilakukan agar setiap potensi anggaran

yang ada dapat didayagunakan untuk membiayai program/kegiatan yang merupakan prioritas daerah.

Kenyataan menunjukkan bahwa sumber pendapatan daerah terutama pendapatan asli daerah sendiri, masih relatif terbatas sehingga pemerintah daerah sangat mengandalkan sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat. Sebagai gambaran dapat dikemukakan bahwa untuk komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015, ditargetkan sebesar Rp.34.433.370.276., realisasinya sebesar Rp. 32.214.055.022,46., Untuk Dana Perimbangan Tahun 2015, ditargetkan Rp. 417.554.139.545., dengan realisasi sebesar Rp. 406.171.585.222., atau memberikan kontribusi sebesar 97,27% terhadap total pendapatan, sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah, ditargetkan sebesar Rp.50.364.511.953., dengan realisasi Rp.41.919.607.444, atau memberikan kontribusi sebesar 83,23% terhadap total pendapatan.

Struktur APBD Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2015, dapat disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 12

**Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumba Barat
Tahun Anggaran 2015**

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) | | Capaian (%) |
|------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| | | Target | Realisasi | |
| I. | Pendapatan | 502.352.021.774 | 480.305.197,688 | 95.61 |
| 1. | PAD | 34.433.370.276 | 32.214.055.022,46 | 93.55 |
| 2. | Dana Perimbangan | 417.554.139.545 | 406.171.585.222 | 97.27 |
| 3. | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 50,364.,511.953 | 41.919.607.444 | 83,23 |
| II. | Belanja | 551.716.431.688,29 | 416.177.944.653 | 75,43 |
| 1. | Belanja Tidak Langsung | 223.913.323.460,89 | 183.459.668.501 | 81.93 |
| 2. | Belanja Langsung | 327.803.108.277,40 | 232.718.276.152 | 70,99 |
| III. | Pembiayaan Daerah | 551.716.431.688,29 | 416.177.944.653 | 75,43 |
| 1. | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 69.864.409.914,29 | 70.301563.563,29 | 100,63 |
| 2. | Pengeluaran Pembiayaan | 20.500.000.000 | 20.500.000.000 | 100,00 |

5. Kondisi Pemerintahan

Wilayah administratif pemerintahan di Kabupaten Sumba Barat pada Tahun 2015, terdiri dari 6 kecamatan, 11 kelurahan dan 63 desa. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terdiri dari 1 sekretariat daerah dengan 11 bagian, 1 sekretariat DPRD, 13 dinas daerah, 13 lembaga teknis daerah, 6 kecamatan, 11 kelurahan, selain itu terdapat pula 2 perusahaan daerah, 8 kantor Instansi vertikal, 1 BUMD, dan 6 BUMN.

Keberhasilan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia aparatur, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Secara kuantitas jumlah PNS di Kabupaten Sumba Barat dalam Tahun 2015, berjumlah 2.884 orang dengan kualifikasi pendidikan terendah adalah SMP dan kualifikasi pendidikan tertinggi adalah magister (strata 2) dengan jumlah yang relatif terbatas yakni 17 orang. Sedangkan dari aspek golongan terdapat pegawai dengan kualifikasi Golongan I sebanyak 85 orang, Golongan II sebanyak 900 orang, Golongan III sebanyak 1.467 orang, Golongan IV sebanyak 430 orang, dan di bantu oleh 2.552 Tenaga kontrak Daerah.

Dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan belum berjalan optimal sehingga perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pendidikan dan pelatihan perlu ditingkatkan kedepan.

6. Kondisi Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya merupakan variabel yang turut memengaruhi percepatan pembangunan suatu daerah. Pengalaman Sumba Barat menunjukkan bahwa aspek tersebut merupakan kontribusiter besar terhadap pembangunan masyarakat menuju kesejahteraan sehingga perhatian untuk mengeliminir berbagai permasalahan yang masih dihadapi terus dilakukan.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan kesehatan dalam Tahun 2015 diletakan pada kerangka penanggulangan, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi dengan tetap mendorong masyarakat untuk

berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara kesehatan pribadi, keluarga dan lingkungannya.

Salah satu variabel sosial budaya yang turut memengaruhi kemajuan pembangunan daerah adalah kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu variabel yang turut menentukan kualitas sumber daya manusia. Data menunjukkan bahwa dari aspek prasarana dan sarana kesehatan, saat ini terdapat 2 Rumah Sakit dengan Instalasi Gawat Darurat yang dapat diakses masyarakat 1 x 24 jam, 8 Puskesmas, 11 Puskesmas Pembantu, 7 Puskesmas Keliling, sebagai basis pelayanan kesehatan di daerah ini.

Secara umum berbagai intervensi kesehatan yang dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir telah meningkatkan kualitas kesehatan dalam masyarakat, yang dapat ditelaah melalui peningkatan capaian komponen IPM Kabupaten Sumba Barat di bidang kesehatan, termasuk capaian dalam menurunkan angka mortalitas, meningkatkan morbiditas, dan variabel kesehatan lainnya.

Data capaian komponen IPM bidang kesehatan dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup Penduduk Sumba Barat yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yakni pada Tahun 2012 mencapai 65,38 tahun, meningkat menjadi 65,75 tahun pada Tahun 2013, dan beberapa capaian lainnya sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini yang diukur menurut standar pelayanan minimal kesehatan sesuai pedoman Kementerian Kesehatan :

Tabel.13

Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2015

| No | Indikator-SPM | Realisasi | Target | % |
|-----|--|-----------|--------|--------|
| 1. | Kunjungan ibu hamil K4 | 1.787 | 2.842 | 62,88 |
| 2. | Komplikasi kebidanan yang ditangani | 392 | 595 | 65,88 |
| 3. | Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 1.756 | - | - |
| 4. | Pelayanan nifas | 1.709 | 2.842 | 60,13 |
| 5. | Neonatus dengan komplikasi yang di tangani | 79 | 406 | 19,46 |
| 6. | Kunjungan bayi | 2.546 | - | - |
| 7. | Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 20 | 74 | 27.03 |
| 8. | Pelayanan anak balita | 9.615 | - | - |
| 9. | Pemberian makan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin | - | - | - |
| 10. | Balita gizi buruk mendapat perawatan | 81 | - | - |
| 11. | Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat | - | - | - |
| 12. | Peserta KB aktif | 901 | 20.004 | 13,53 |
| 13. | Penemuan dan penanganan penderita penyakit - <i>Acute Flacit Paralysis</i> (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun | - | - | 0 |
| 14. | Penemuan dan penanganan penderita penyakit - penemuan penderita Pneumanonia Balita | - | - | - |
| 15. | Penemuan dan penanganan penderita penyakit - penemuan pasien baru TB - BTA positif | 374 | 260 | 143,85 |
| 16. | Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | - | - | - |
| 17. | Penemuan dan penanganan penderita penyakit - diare | - | - | - |
| 18. | Pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin | 11.460 | 11.500 | 99.65 |
| 20. | Pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota | - | - | - |
| 21. | Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam | - | - | - |
| 22. | Desa siaga aktif | 20 | 23 | 86,96 |

Selanjutnya mengenai tingkat morbiditas dapat ditelaah melalui optimalisasi fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya melalui pelayanan rawat jalan dan rawat inap, yang cenderung mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, sebagai akibat semakin membaiknya fasilitas pelayanan kesehatan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Dari pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas di wilayah Kabupaten Sumba Barat, dapat diketahui pola penyakit dominan pada pasien rawat jalan antara lain ISPA, malaria, infeksi, infeksi kulit, diare dan lain-lain. Di samping penemuan dan penanganan kasus TB BTA (+) pada Tahun 2015 sebanyak 374 kasus, dari jumlah perkiraan penderita baru TB BTA (+) yaitu 260 kasus.

Melalui berbagai upaya kesehatan yang dilaksanakan selama ini, terdapat peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang akan terus diupayakan ke depan, walaupun masih terdapat berbagai serangan penyakit akibat wabah, pola hidup, pola makan, pola asuh, dan lain-lain yang secara langsung memengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Beberapa peningkatan pelayanan kesehatan menyangkut penanganan komplikasi kebidanan, pertolongan persalinan, penanganan gizi buruk, penanganan BTA (+), penanganan persalinan, penanganan ibu hamil (K1-K4), dan intervensi kesehatan lainnya, telah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sebagaimana rujukannya dapat dilihat dalam tabel di atas.

Dengan berbagai upaya untuk membangun sarana kesehatan berupa Puskesmas, Pustu, peningkatan Pustu menjadi Puskesmas, Polindes, Posyandu, maka ada jejaring unit kesehatan yang saling menunjang peningkatan pelayanan kesehatan, di mana rasio Pustu terhadap Puskesmas mencapai 3 : 1, yaitu 1 Puskesmas didukung 3 Puskesmas Pembantu.

Selanjutnya kondisi keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, sampai dengan akhir Tahun 2015 cukup kondusif untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa masih terjadi kasus pencurian, perjudian, perampokan, penganiayaan, dan lain sebagainya yang telah menurunkan stabilitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Terdapat beberapa kejahatan/pelanggaran yang telah menurunkan stabilitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat antara lain kejahatan terhadap ketertiban umum, pembakaran, pencurian, pembunuhan, perampokan, dan kejahatan lainnya di sejumlah kasus ini masih mencakup Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dalam mengeliminir berbagai gangguan, upaya pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat terus dilaksanakan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun bekerjasama dengan instansi terkait, dan sampai dengan akhir Tahun 2015, situasi cukup kondusif.

Gambaran umum kondisi sosial demografis yang dikemukakan di atas, selain merupakan potensi sumber daya yang dapat didayagunakan untuk pelaksanaan pembangunan daerah, juga menyimpan masalah apabila tidak dikelola secara baik. Untuk itu telah digulirkan beberapa program pembangunan untuk meminimalisir kondisi di atas sebagaimana akan digambarkan pada bagian berikutnya sesuai 4 Pilar Utama/Catur Bhakti Tahun 2010–2015.

Demikian gambaran umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015, yang sekaligus merupakan potensi kekuatan dan kelemahan yang perlu dikelola secara baik untuk mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat pada Tahun 2015 dan tahun-tahun selanjutnya, sebagaimana hasil-hasilnya akan digambarkan dalam bagian berikutnya dari Laporan ini.